

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Bangka Belitung

A. Pedoman Wawancara dengan WALHI, GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Bagaimana pendapat (narasumber) tentang peraturan Daerah di Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral tentang reklamasi kegiatan yang dilakukan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan?
2. Kebijakan khusus apa yang diterapkan terkait nilai dasar penanaman karakter peduli lingkungan kepada masyarakat Bangka Belitung?
3. Adakah kegiatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup seperti contohnya penanaman hutan Mangrove dan pengolahan sampah?
4. Bagaimana sosialisasi dalam memberikan pemahaman pentingnya keseimbangan alam kepada masyarakat?
5. Apa saja topik isu yang dibawa oleh gerakan saat melakukan kampanye lingkungan?
6. Faktor apa yang penghambat dalam strategi penanaman nilai karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung?
7. Bagaimana cara proses advokasi hukum lingkungan yang ada di Bangka Belitung?
8. Bagaimana solusi dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah, masifnya perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung?
9. Bagaimana cara memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat untuk pemahaman pentingnya keseimbangan alam?
10. Bagaimana peran media dalam mendukung gerakan peduli lingkungan?

B. Pedoman Observasi di WALHI, GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pedoman Observasi

Tujuan:

Untuk mengetahui gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung.

| No | Indikator | Aspek yang diamati |
|----|--|--|
| 1 | Gerakan kewarganegaraan ekologis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati aktivitas WALHI, GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Mengamati reklamasi pasca penambangan timah yang sudah dilakukan 3. Mengamati penanaman hutan Mangrove yang sudah dilakukan 4. Mengamati program peduli sampah pedesaan dan perkotaan |
| 2 | Hambatan pembentukan karakter peduli lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati aktivitas penambangan yang dilakukan masyarakat lokal. 2. Mengamati aktifitas pembuangan sampah. |
| 3 | Upaya mengatasi hambatan pembentukan karakter peduli lingkungan melalui gerakan kewarganegaraan ekologis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati media sosial resmi WALHI, GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Mengamati tempat wisata pasca penambangan yang dikelola oleh masyarakat setempat. 3. Mengamati pendidikan berbasis masyarakat melalui rumah baca akar GAPABEL |

C. Pedoman Dokumentasi di WALHI, GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pedoman Dokumentasi

Tujuan:

Untuk mengetahui ketersediaan data dan sumber data pada gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung.

| No | Aspek yang diamati | Ketersediaan | | Keterangan |
|----|--|--------------|-------|------------|
| | | Ada | Tidak | |
| 1 | Lingkungan fisik Kantor organisasi berbasis lingkungan | | | |
| 2 | Program yang dijalankan | | | |
| 3 | Data visi, misi, tujuan, dan fasilitas kantor | | | |
| 4 | Data struktur organisasi | | | |
| 5 | Data sarana dan prasarana | | | |
| | Data foto kegiatan-kegiatan di lapangan | | | |
| 6 | Contoh tanaman untuk reklamasi pasca penambangan | | | |
| 7 | Contoh tanaman mangrove layak tanam | | | |
| 8 | Contoh wadah pembuangan sampah | | | |

Lampiran 2. Data Hasil Penelitian Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Bangka Belitung

A. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara 1

Nama Responden : Retno Budi
Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung
Tanggal : 06/04/2018
Kode : W/RB-DEksWALHI/6/4/2018

1. Bagaimana eksistensi gerakan WALHI di Bangka Belitung?
Eksistensi gerakan WALHI Bangka Belitung dalam memberikan pendampingan terhadap lingkungan hidup bisa dilihat pada kasus yang ditangani seperti perusahaan penambangan kapal isap, perusahaan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan pencemaran sampah. Gerakan yang kami lakukan berdasarkan pengaduan masyarakat seperti yang dilakukan baru-baru ini, kami dan nelayan melakukan aksi protes kepada perusahaan-perusahaan pemilik kapal isap di teluk Kelabat yang melakukan penambangan di sekitar tangkapan nelayan. Maka dampak langsungnya kepada nelayan menurunnya tangkapan ikan, hal yang bisa kita lihat akibat penambangan kapal isap rusaknya arena ekosistem laut berupa terumbu karang dan habitat spesies ikan.
2. Bagaimana akibat dari aktivitas penambangan timah tersebut?
Akibat penambangan timah menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak terkendali. Aktivitas penambangan berbagai macam dampak, dimulai dari berkurangnya lahan pertanian, kita lihat baru-baru ini bencana alam seperti banjir terjadi dimana-mana di Babel.
3. Bagaimana cara proses advokasi hukum yang dilakukan WALHI?
Masalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan menjadi protes WALHI untuk mendesak motarium penambangan timah. Aksi mendesak pemerintah untuk memastikan kewajiban perusahaan penambangan melakukan reklamasi pasca penambangan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh berpihak pada perusahaan-perusahaan besar dan harus mementingkan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh perda RZWP3K yang sangat merugikan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan.
4. Bagaimana pendidikan yang dilakukan WALHI kepada masyarakat?
Tiap bulan ada cukup banyak peneliti mengambil data dari WALHI baru-baru ini mahasiswa dari ITB, dari situ kita bisa berdiskusi tentang kerusakan ekologi yang ada di Bangka Belitung ini. Kami juga mengadakan diskusi dengan mahasiswa UBB dan bahkan komunitas nelayan yang ada di Bangka Belitung. Nah dari kegiatan diskusi itulah kita dapat mengetahui pokok

permasalahan lingkungan dan mencari solusi terbaik untuk memperbaiki krisis ekologi.

5. Apa solusi yang telah dilakukan WALHI dalam masalah ekologi yang ada di Bangka Belitung?
Solusinya melalui pendidikan, peran media untuk meliput aktivitas penambangan, reklamasi pasca penambangan, mempunyai kurikulum pendidikan lingkungan dan yang paling penting saat ini pemerintah harus melakukan moratorium penambangan timah.
6. Bagaimana cara kerjasama dengan komunitas-komunitas yang lain tentang lingkungan hidup?
Ada banyak kerja sama yang dilakukan WALHI seperti, komunitas nelayan untuk menyuarakan akibat dari pertambangan laut, tokoh masyarakat, dan organisasi dibawah naungan WALHI, kerja sama itu bisa dilihat dalam media resmi WALHI semuanya kegiatan dipaparkan di media.
7. Apakah pemberitaan media sosial membantu program kerja WALHI?
Pemberitaan media bagi WALHI cukup membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan di Bangka Belitung. Media yang dimiliki WALHI seperti blog resmi, facebook, twitter, instagram. Dari media yang dimiliki WALHI masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan bersama organisasi masyarakat lainnya. Pemberitaan melalui media sosial masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan mulai mendapatkan tempat bagi media sebagai berita utama terutama masalah penambangan timah yang ada di Bangka Belitung.

Hasil Wawancara 2

Nama Responden : Pifin Heriyanto
Ketua Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL)
Tanggal : 29/04/2018
Kode : W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018

1. Bagaimana pendapat GAPABEL tentang Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang reklamasi, apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan penambangan dan penambangan masyarakat lokal?
Pertama, yang harus dikritisi adalah tentang perda No 7 tersebut karena kami menilai banyaknya kelemahan dalam hal sosialisasi dari perda tsb, sampai saat ini kami sebagai salah satu organisasi yang berbasis lingkungan belum pernah sama sekali diundang baik dalam tahap pembahasan maupun dalam rangka sosialisasi.
Kedua, adalah keseriusan pemerintah dalam menggarap masalah reklamasi ini apakah hanya sekedar hal yang dianggap biasa biasa saja atau sebuah hal prinsipil, jikalau pemerintah menganggap ini hal biasa biasa saja ya seperti yang kita lihat saat ini, banyaknya reklamasi yang terkesan tanpa konsep dan tanpa master plan yang jelas hanya sekedar mereklamasi sehingga untuk pemulihan lingkungan tidak sampai 100 persen berhasil.
2. Kebijakan khusus apa yang diterapkan GAPABEL terkait nilai dasar pembentukan karakter peduli lingkungan kepada masyarakat Belitung?
Kebijakan khusus yang selalu kita ambil yang pasti kita menyiapkan kader-kader peduli lingkungan baik di tingkatan sekolah, mahasiswa maupun pemuda sehingga dengan mendidik mereka menjadi kader yang peduli terhadap lingkungan dan alam sehingga karakter yang mereka bawa akan melekat pada kehidupan bermasyarakat, kemudian yang tak kalah penting kita selalu mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan dan alam melalui baik media sosial maupun media massa, sehingga kampanye yang biasa kami lakukan mudah2an akan berdampak luas kepada masyarakat terutama kaum kaum muda sehingga kedepannya akan membuat mereka lebih sadar akan arti pentingnya alam dan lingkungan, permasalahan mangrove sudah menjadi isu utama kita semenjak gapabel didirikan baik dengan melakukan sosialisasi ataupun juga langsung praktik di lapangan dengan melakukan pembibitan dan penanaman didaerah yang kondisi mangrove yang sudah kritis diantaranya didaerah Sijuk, pegantungan dan didaerah Tanjungpandan.
3. Bagaimana sosialisasi dalam memberikan pemahaman pentingnya keseimbangan alam kepada masyarakat?
Sekali lagi kami menyiapkan kader kader yang peduli terhadap lingkungan dan alam sehingga mereka akan lebih banyak turun langsung kemasyarakat dalam pemahaman tentang arti pentingnya keseimbangan tsb,

4. Apa saja topik isu kampanye gerakan GAPABEL terhadap lingkungan?
Topik yang kita angkat sedikit beragam baik tentang kepedulian terhadap lingkungan yaitu penolakan tambang laut, perambahan hutan, mangrove dan juga kesadaran tentang kepedulian terhadap sampah.
5. Faktor apa yang menghambat pembentukan nilai karakter peduli lingkungan?
Kurangnya pendidikan disekolah terutama muatan lokal tentang kepedulian terhadap alam dan lingkungan.
6. Bagaimana pendapat GAPABEL tentang penegakan hukum lingkungan yang ada di Belitung?
Dari beberapa kasus yang pernah terjadi kami menganggap penegakan hukum lingkungan hanya menjadi formalitas semata tidak ada yang serius.
7. Bagaimana cara GAPABEL memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat?
Sekali lagi dengan menyiapkan kader kader peduli lingkungan dan alam sehingga mereka bisa langsung terjun ke masyarakat.
8. Bagaimana peran media massa yang dilakukan GAPABEL dalam mendukung gerakan peduli lingkungan ?
Alhamdulillah sampai saat ini kawan kawan yang bergerak di media massa selalu mensupport apa yang kami lakukan sehingga dapat menjadi media kampanye kami dalam memberikan sedikit kesadaran kepada masyarakat

Hasi Wawancara 3

Nama Responden : Zulvan Setiawan
Tanggal : 02/04/2018
Kode : W/ZN/02/04/2018

1. Bagaimana pandangan WALHI tentang masyarakat yang membuka lahan pertanian lada maupun kelapa sawit?
Masyarakat dalam membuka lahan untuk pertanian seharusnya mengetahui lahan yang produktif untuk membuka lahan pertanian. Wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka perkebunan sawit tentunya harus ditaati. Sebagai contoh untuk perkebunan kelapa sawit yang cocok daerah rawa yang banyak mengandung air. Sehingga kami melakukan berbagai kegiatan aksi kampanye untuk membuka kesadaran masyarakat agar bisa mengawasi perusahaan yang akan membuka perkebunan kelapa sawit.
2. Bagaimana cara memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat untuk pemahaman pentingnya keseimbangan alam?
Pendidikan yang dilakukan WALHI dengan seminar dan workshop secara aktif. Baru-baru ini kami melakukan diskusi dengan mahasiswa Universitas Bangka Belitung tentang penambang timah. Hal menjadikan pemahaman untuk membangun kesadaran melestarikan sumber daya alam dan memperbaiki kerusakan lingkungan. dan ada juga kami melakukan diskusi dengan organisasi petani yang mana wilayah tangkapan mereka terdapat penambangan kapal isap.
3. Hal apalagi yang biasa dilakukan WALHI memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat?
Banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya dengan membuat program-program atau kegiatan yg berwawasan lingkungan, melakukan kampanye misalnya di sosial media tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan audiensi dengan masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan
4. Bagaimana peran media dalam mendukung kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tersebut?
Saat ini, mungkin peran media belum berjalan secara maksimal, terutama dalam mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga lingkungan
5. WALHI mendesak pemerintah melakukan moratorium penambangan timah di Bangka Belitung. Bagaimana perkembangan desakan tersebut?
Nah dalam hal ini kami bersama LSM lainnya mendesak pemerintah memberlakukan audit lingkungan hidup dari semua perizinan tambang. Pemerintah juga harus menegakkan aturan hukum yang jelas bagi perusahaan yang masih melakukan penambangan sehingga dapat melakukan reklamasi lahan pasca penambangan.

6. Bagi WALHI apa ancaman yang serius tentang aktivitas penambangan?
Bagi WALHI aktivitas tambang menimbulkan ancaman bagi generasi yang akan datang, mengingat banyaknya anak-anak di bawah umur dan perempuan yang ikut bekerja di tambang timah. Persoalan ini menghasilkan hilangnya sumber ekonomi warga dari sektor pertanian yang hutan tergerus dari penambangan timah, situasi ini harus segera diselamatkan dengan cara moratorium penambangan.

7. Bagaimana pendapat WALHI tentang penegakan hukum terhadap penambangan timah?
Aparatur penegakan hukum yang jelas menjamin penetapan sanksi yang terbukti melakukan kejahatannya merusak dan pencemaran lingkungan hidup. Berbagai aksi protes WALHI dan masyarakat tentang izin penambangan yang dikenal dengan Moratorium penambangan timah. Berdasarkan pendapat WALHI menegaskan kerusakan lingkungan tidak lepas dari belum berjalannya hukum tentang lingkungan hidup. Aksi mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium penambangan timah sebagai acuan dan pedoman dalam usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL). Oleh karena itu, moratorium penambangan timah, perusahaan kaulin, dan perusahaan kelapa sawit untuk mencegah kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara masif. Sebagai salah satu kontrol pemerintah adalah dasar hukum yang jelas demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh berpihak pada perusahaan-perusahaan besar dan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat

Hasi Wawancara 4

Nama Responden : Agus Iskandarsyah
Staf Pengawasan DLH Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Tanggal : 5/3/2018
Kode : W/AI-StafDLH/5/3/2018

1. Kebijakan khusus apa DLH Bangka Belitung saat ini?
Saat ini dinas lingkungan hidup Bangka Belitung banyak melakukan sosialisasi pengolahan sampah. Sosialisasi bank sampah sudah kita lakukan pada tahun 2013 pembentukan bank sampah pengkantor dan sekolah-sekolah dan bank sampah yang ada di kampung masyarakat. Bank sampah itu kita totalkan ada 50 unit yang aktif di seluruh bangka belitung, akan tetapi banyak juga bang sampah yang tidak aktif. Maksudnya sampah yang hanya dikumpulkan dan di tumpuk. Kalo aktif mereka secara kontinyu mengumpulkan dan ada proses penjualan ke bank sampah induk. Jadi cerita bang sampah ini ada bank sampah anak contohnya sekolah, pengkantor, perumahan trus mereka jual ke bangsampah induk. Bangsampah induk ini di tunjuk oleh pemerintah untuk menampung bank sampah
2. Selain permasalahan sampah, adakah kegiatan lain yang di lakukan DLH yang melibatkan masyarakat?
Baru-baru ini kami melakukan penanaman mangrove di wilayah bangka tengah. Nah, sebelum melakukan penanaman mangrove kami dinas lingkungan hidup sebelumnya sudah membuat terlebih dahulu pembibitan mangrove yang dirawat sampai layak ditanam. Setelah layak untuk ditanam kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan penanaman secara bersama yang berdasarkan wilayah yang layak untuk ditanami hutan mangrove
3. Bagaimana pendapat DLH tentang peraturan Daerah di Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 mengenai reklamasi pasca penambangan?
Masalah reklamasi ini pada umumnya urusan perusahaan tambang, namaun yang jadi masalah saat ini penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum terlihat melakukan reklamasi pasca penambangan. Kami dari DLH juga sering dilibatkan dalam reklamasi bersama perusahaan tambang timah.
4. Adakah kegiatan kreativitas masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup seperti contohnya penanaman hutan Mangrove dan pengolaan sampah?
Untuk kegiatan kreative saat ini sudah berjalan pengeolahan sampah yang ada di desa gadung. Bahan daur ulang ini misalnya dibuat taplak meja, dibuat keranjang, tas itu kan. Trus bang sampah cambai sudah dibuat biji plastik. Ada mungkin bang sampah lain yang belum terdaftar yang belum kami ketahui. Trus ada lagi bang sampak kabupaten bangka selatan yang

telah membuat tas plastik kresek. Mereka memanggil narasumber dari tangerang jadi ada ibu PKK yang membuat tas dari plastik kresek.

5. Bagaimana cara memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat untuk pemahaman pentingnya keseimbangan alam?
Pendidikan lingkungan beberapa waktu lalu kami lakukan di sekolah yang ada di kabupaten bangka selatan. Dan juga sosialisai persampahan di desa Gadung. Kami memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mengolah sampah organik dan anorganik. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh siswa yaitu mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Kegiatan ini yang sudah berjalan cukup baik di SMA N 1 Payung.
6. Bagaimana pendapat anda tentang reklamasi pasca penambangan?
Menurut saya reklamasi pasca penambangan belum berjalan secara maksimal
7. Apa kegiatan rutin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan?
Melakukan kegiatan reboisasi, dengan mensosialisasikan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kegiatan tersebut, terutama tokoh masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan terutama pasca penambangan

B. Hasil Studi Dokumentasi

Hasil studi dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti untuk menambah informasi yang telah didapat dari berbagai sumber data. Hasil studi dokumendalam penelitian ini berbentuk data statistik BPS, surat, laporan, foto, video, dan data lainnya sebagai bukti aktivitas yang pernah dilakukan DLH, WALHI dan masyarakat terkait dengan gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan di bangka belitung.

Hasil Studi Dokumen 1

Jenis : Data Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



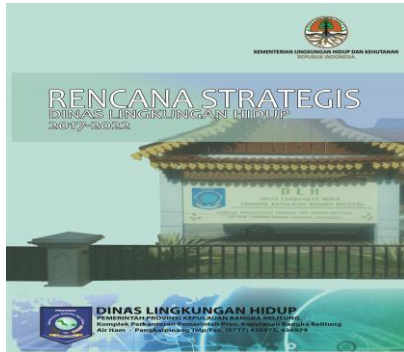
| No | Fokus Kajian | Kontribusi dalam Penelitian |
|----|--|--|
| 1 | Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,06 km ² yaitu wilayah daratan 16.424,23 km ² dan lautan 65.301 km ² . Kota Pangkalpinang menjadi Ibukota provinsi yang terdiri 7 kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Data statistik ini peneliti mengetahui dan mendapatkan data tentang luas wilayah daratan dan lautan yang ada di peta wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| 2 | Profil pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017- 2022 yang memiliki jumlah penduduk mencapai 1.430.865 Jiwa pada tahun 2017. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh 46 lembaga dinas salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelumnya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). DLH dibentuk salah satu unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pengendalian dampak lingkungan. Indeks |

| | | |
|----|---|--|
| | | Demokrasi Indonesia (IDI) untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertahan di posisi kelompok baik. Data statistik ini peneliti mendapatkan data tentang jumlah penduduk dan lembaga dinas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| 3 | Angkan kerja penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Keadaan angka kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sekitar 1.047.683 penduduk usia kerja. Persentase penduduk laki-laki yang berkerja di Sektor Pertanian sebesar 34,67 persen dan Sektor Pertambangan menempati posisi dua teratas yang paling banyak menyerap tenaga sebanyak 19,35 persen. Sedangkan tenaga kerja perempuan mayoritas bekerja di Sektor Perdagangan sebesar 31,37 persen dan Sektor Pertanian 28,48 Persen. Melihat data statistik ini peneliti mendapatkan data tentang persentase yang mendominasi penduduk bekerja di sektor pertanian dan pertambangan. |
| 4 | Laju pertumbuhan perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Sektor perkebunan memberi kontribusi unggulan salah satunya lada putih yang memiliki brand <i>Muntok White Pepper</i> . Pada tahun 2017, peningkatan produksi lada putih namun tidak diimbangi harga yang diterima petani. Peningkatan juga tidak hanya di perkebunan lada putih namun juga di sektor perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2016 jumlah perkebunan besar kelapa sawit naik menjadi 62 perusahaan. Untuk itu pemerintah harus mendukung perkebunan rakyat untuk mengimbangi peningkatan jumlah perusahaan besar sehingga dapat menyerap lapangan angka kerja sektor pertanian. Data statistik ini peneliti mendapatkan data lapangan angka laju pertumbuhan lapangan usaha sektor perkebunan. |
| 5. | Laju pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan sejarah panjang pertambangan timah yang dilakukan perusahaan besar dan pertambangan rakyat yang dikenal dalam masyarakat penambangan TI. Laju pertumbuhan sektor penambangan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2014 yang puncaknya pada tahun 2017. Data statistik ini peneliti mendapatkan data laju pertumbuhan penambangan timah. |

Hasil Studi Dokumen 2

Jenis : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022

Sumber : DLH



| No | Fokus Kajian | Konttribusi dalam Penelitian |
|----|--|--|
| 1 | Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | Data yang diperoleh dari proses penyusunan Renstra meliputi penyusunan rumusan visi, misi, tujuan, nilai-nilai organisasi dan perumusan strategi yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Peneliti juga mendapatkan data tentang gambar Alur Pikir Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| 2 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup. | Peneliti dapat memperoleh data tentang kegiatan DLH dalam melindungi sumber daya alam seperti program pengembangan ekowisata, program rehabilitasi penanaman pohon pasca penambangan dan mangrove dimulai dari penyiapan bibit tanaman, program pengolahan sampah, dan program peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi lingkungan hidup pada usia dini sampai masyarakat. |

Hasil Studi Dokumen 3

Jenis : Laporan Hasil Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupaten
 Bangka Selatan
 Sumber : DLH 2018

NOTA – DINAS

Kepada Yth. : Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017
 Dari : Ketua Tim Teknis Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017
 Tanggal : 07 Agustus 2017
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Hasil Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupaten Bangka Selatan

Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Hasil Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupaten Bangka Selatan yang telah kami laksanakan dari tanggal 17 s/d 31 Juli 2017 meliputi 18 (delapan belas) Desa di Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut :

1. **Dasar Pelaksanaan**
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/137/DFKPLH/2017 tanggal 22 April 2017 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Tahun Anggaran 2017
2. **Maksud dan Tujuan**
Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Tahun Anggaran 2017 ini adalah Melakukan Penilaian terhadap 18 (delapan belas) Desa di Kabupaten Bangka Selatan serta bermaksud mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3. **Waktu dan Tempat**
Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Tahun Anggaran 2017 ini bertempat di 18 (delapan belas) Desa Kabupaten Bangka Selatan

| NO | NAMA DESA | HARI/TANGGAL |
|----|---|--|
| 1 | Kecamatan Tukak Sadai : 1. Desa Tukak 2. Desa Sadai | 17 Juli 2017 17 Juli 2017 |
| 2 | Kecamatan Air Gegas : 1. Desa Bencah 2. Desa Air Bara 3. Desa Sidoarjo | 18 Juli 2017 18 Juli 2017 19 Juli 2017 |
| 3 | Kecamatan Pulau Besar : 1. Desa Suka Jaya 2. Desa Sumber Jaya Permai 3. Desa Fajar Indah | 20 Juli 2017 20 Juli 2017 21 Juli 2017 |
| 4 | Kecamatan Payung : 1. Desa Payung 2. Desa Sengir 3. Desa Malik | 22 Juli 2017 24 Juli 2017 24 Juli 2017 |
| 5 | Kecamatan Simpang Rimba : 1. Desa Rajik | 25 Juli 2017 |
| 6 | Kecamatan Lepar Pongok : 1. Desa Penutuk 2. Desa Tanjung Labu 3. Desa Tanjung Sangkar | 26 Juli 2017 26 Juli 2017 27 Juli 2017 |
| 7 | Kecamatan Kepulauan Pongok : 1. Desa Pongok 2. Desa Celagen | 28 Juli 2017 29 Juli 2017 |
| 8 | Kecamatan Toboali : 1. Desa Bikang | 31 Juli 2017 |

4. Hasil yang di peroleh

Hasil dari pelaksanaan penilaian Adipura Desa di Kabupaten Bangka Selatan ini adalah berupa nilai dari kebersihan dan keteduhan desa tersebut. Adapun Nilai Adipura tersebut berdasarkan peringkat sebagai berikut :

| NO | NAMA DESA | KECAMATAN | NILAI ADIPURA |
|----|------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | DESA TUKAK | KEC. TUKAK SADAI | 54,44 |
| 2 | DESA RAJIK | KEC. SIMPANG RIMBA | 47,85 |
| 3 | DESA SENGIR | KEC. PAYUNG | 47,66 |
| 4 | DESA MALIK | KEC. PAYUNG | 44,90 |
| 5 | DESA PENUTUK | KEC. LEPAR PONGOK | 44,63 |
| 6 | DESA BIKANG | KEC. TOBOALI | 44,61 |
| 7 | DESA CELAGEN | KEC. KEP. PONGOK | 44,33 |
| 8 | DESA PAYUNG | KEC. PAYUNG | 44,01 |
| 9 | DESA PONGOK | KEC. KEP. PONGOK | 43,87 |
| 10 | DESA FAJAR INDAH | KEC. PULAU BESAR | 43,64 |
| 11 | DESA AIR BARA | KEC. AIR GEGAS | 43,45 |
| 12 | DESA TIRAM | KEC. TUKAK SADAI | 42,96 |
| 13 | DESA SUMBERJAYA PERMAI | KEC. PULAU BESAR | 42,70 |
| 14 | DESA BENCDAH | KEC. AIR GEGAS | 41,36 |
| 15 | DESA TANJUNG LABU | KEC. LEPAR PONGOK | 41,03 |
| 16 | DESA SIDOHARJO | KEC. AIR GEGAS | 40,87 |
| 17 | DESA TANJUNG SANGKAR | KEC. LEPAR PONGOK | 39,79 |
| 18 | DESA SUKAJAYA | KEC. PULAU BESAR | 37,53 |

| No | Fokus Kajian | Kontibusi dalam Penelitian |
|----|--|---|
| 1 | Maksud dan tujuan Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa | Data yang diperoleh dari Laporan Hasil Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa bermaksud mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. |
| 2 | Hasil yang diperoleh dari Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa | Peneliti dapat memperoleh data Hasil Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa tentang penilaian pemukiman mesasyarakat, jalan utam desa, jalan lingkungan desa, kantor desa, sekolah, pasar, pertokoan, polkesdes, hutan desa, sungai danau perairan, bank sampah, dan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). |

Hasil Studi Dokumen 4

Jenis : Menganalisis dokumen publik daftar pemegang IUPHHK-HTI
 Sumber : WALHI Provinsi Bangka Belitung 2018

| DAFTAR PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------|----------------------|
| No | Pemegang IUPHHK-HTI | SK Persetujuan Menteri | Lokasi (Kabupaten / Kawahut) | Tanaman Pokok | Luas (Ha) | Real Penanaman |
| 1. | PT. Inhitani V Unit Bangka | SK.377/Menhut-II/2009 25 Jun 2009 (definitif) | Kab. Bangka : HP. Sekah Tengkalat dan HP. Sungailiat Mapur | Karet, Akasia, Sengon | 16.730 | 125,70 Ha (7,51%) |
| 2. | PT. BangkaNesia | SK.639/Menhut-II/2009 9 Okt 2009 (definitif) | Kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan : HP. Lubuk Besar | Meranti, Eboni, Bambu | 51.205 | 94,84 Ha (0,34%) |
| 3. | PT. Istana Kawi Kencana (PT. IKK) | SK.136/Menhut-II/2010 25 Mar 2010 (definitif) | Kab. Bangka : HP. Sekah Tengkalat, Belinyu II, dan G. Moras | Akasia, Karet, Meranti, Nyctol, Belangian | 13.480 | 175,26 Ha (2,33%) |
| 4. | PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS) | SK.208/Menhut-II/2011 12 Apr 2011 (definitif) | Kab. Bangka : HP. Kitarawaringin, HP. Sembulan, Kab. Belitung : HP. Songkai, HP. G. Tikus, HP. Batu Itam Air Golarak, HP. S. Itang, S. Pala | Sengon, Akasia, Karet | 30.773 | 0,00 Ha (0,00%) |
| 5. | PT. Inio Sukses Lestari Makmur (PT. ISLM) | SK.780/Menhut-II/2012 26 Des 2012 | Kab. Belitung Timur : HP. Gunung Duren | Karet, Meranti, Nyctol | 10.045 | 12,20 Ha (0,23%) |
| 6. | PT. Bangun Rimba Sejahtera (PT. BRS) | SK.336/Menhut-II/2013 16 Mei 2013 | Kab. Bangka Barat : Kayu Arang (HP. Kota Waringin) dan Jebus (HP. Jebu Bembang) | Akasia mangium | 66.460 | 9,00 Ha (0,03%) |
| 7. | PT. Agrindo Persada Lestari (PT. APL) | SK.338/Menhut-II/2014 27 Mar 2014 (IUPHHK-HTI) | Kab. Bangka Tengah : HP. Sungai Kurau dan HP. Sungai Sembulan | Sengon dan Karet | 25.253 | 0,00 Ha (0,00%) |
| 8. | PT. Andalan Karya Perthwi (PT. AKP) | 8/1/IUPHHK-HTI/PMON/2015 19 Ags 2015 | Kab. Belitung Timur : HP. Buding Barat, HP. Buding Timur, HP. Gunung Duren, dan HP. Senusur Sembulu | Jati, Sengon, Acacia acaciarpa, Acacia Mangium | 29.140 | 0,00 Ha (0,00%) |
| 9. | PT. Hutan Lestari Raya (PT. HLR) | 19/1/IUPHHK-HTI/PMON/2017 20 Des 2017 | Kab. Bangka Selatan : HP. Sungai Balar dan HP. Sungai Nyctol | | 31.630 | 0,00 Ha (0,00%) |
| Luas Kersah | | | | | 275.682 | |

* Total luasan IUPHHK-HTI : 41,83% dari 659.014 Ha kawasan HP
 * Real penanaman dihitung dari luasan tanaman pokok sesuai Rencana Kerja Umum (RKU) Perusahaan

| No | Fokus Kajian | Konttribusi dalam Penelitian |
|----|--|---|
| 1 | Jumlah perusahaan hutan tanaman industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Data yang diperoleh peneliti jumlah perusahaan HTI disetiap kabupaten. WALHI menerangkan pemetaan yang dilakukan sekarang kepada PT.Hutan Lestari Raya di kabupaten Bangka Selatan. Tuntutan pencabutan IUPHHK-HTI, dimana luas lahan telah dikelola menjadi perkebunan lada, karet dan sawit oleh masyarakat setempat. |

Hasil Studi Dokumen 5

Jenis : Dokumen Sosialisai Pengelolaan Persampahan Perkotaan
Sumber : DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018



| No | Fokus Kajian | Kontibusi dalam Penelitian |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Kebijakan Pengelolaan Sampah | Data yang diperoleh peneliti dari dokumen sosialisasi DLH Provinsi Bangka Belitung yaitu: arah kebijakan, strategi pengurangan sampah, penanganan sampah, pendanaan, dasar hukum, program pengumpulan, pengangkutan, pemindahan, pemilahan, pewadahan, pengolahan sampah di TPST, rencana sistem pengelolaan sampah mendatang serta persentase sampah yang sudah dikelola. |

Hasil Studi Dokumen Foto



Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah

Sumber: DLH 2018

Bentuk sosialisasi dinas lingkungan hidup tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah.



Forum Diskusi Penambangan Timah

Sumber: WALHI 2018

Forum diskusi mencari solusi bersama-sama yang dibutuhkan masyarakat terkait masalah lingkungan yang berkembang.



Rumah Baca Akar GAPABEL

Sumber: GAPABEL (2018)

rumah baca bertajuk Rumah Baca Akar GAPABEL berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup diharapkan memperkuat karakter peduli lingkungan sejak dini dalam mempersiapkan kader-kader lingkungan.



Aksi bersih sampah

Sumber: GAPABEL (2018)

Organisasi berbasis lingkungan GAPABEL menunjukkan perannya dalam membersihkan sampah di obyek wisata.



Reklamasi Pasca Penambangan
Sumber : DLH 2018

Reklamasi pasca penambangan yang dilakukan Polda bekerjasama dengan PT.Timah dan DLH. Kerjasama stekholder ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan pasca penambangan.



Penanaman Mangrove
Sumber : DLH 2018

Penanaman mangrove di pesisir pantai jalan lintas kabupaten dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kerjasama dengan sekolah-sekolah



Pembibitan Mangrove
Sumber : GAPABEL 2018

Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL) melibatkan kader-kader muda secara langsung memberikan contoh proses pembibitan sampai layak tanam

C. Hasil Studi Observasi

Hasil studi Observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti untuk menambah informasi yang telah didapat dari berbagai sumber data. Hasil studi observasi dalam penelitian ini dilakukan pada kantor DLH, kantor WALHI, lokasi reklamasi pasca penambangan, penanaman mangrove dan bekas galian tambang kaolin di Bangka tengah terkait dengan gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung.

Hasil Observasi 1



Hari/Tanggal : 15/4/2018
Lokasi : Kantor
WALHI

| No | Aspek yang diamati | Ketersediaan | | Keterangan |
|----|--|--------------|-------|--|
| | | Ada | Tidak | |
| 1 | Lingkungan fisik Kantor WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Kantor WALHI berada di Jl. Belanak Raya No. 64 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang 33118. Data yang diperoleh peneliti pertama menyerahkan surat penelitian kepada Retno Budi sebagai direktur eksekutif WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti mendapatkan izin untuk mengambil data bahkan peneliti berdiskusi dengan anggota WALHI. |
| 2 | Fasilitas WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Prasara kantor seperti komputer akses internet yang memadai untuk melakukan pemetaan wilayah sebelum melakukan kunjungan lapangan penguatan masyarakat. Setiap anggota WALHI mempunyai tugas masing-masing diantaranya pemetaan wilayah advokasi lingkungan, hukum dan lain- |

| No | Aspek yang diamati | Ketersediaan | | Keterangan |
|----|---|--------------|-------|--|
| | | Ada | Tidak | |
| | | | | lain. |
| 3 | Program kegiatan WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Peneliti dapat memperoleh data tentang program kegiatan yang tertera di papan pengumuman. Dari situ peneliti memperoleh data kegiatan WALHI sehari-hari. |

Hasil Observasi 2



Hari/Tanggal : 6/4/2018
 Lokasi : Kantor Dinas
 Lingkungan Hidup
 (DLH) Provinsi
 Kepulauan Bangka
 Belitung

| No | Aspek yang diamati | Ketersediaan | | Keterangan |
|----|--|--------------|-------|---|
| | | Ada | Tidak | |
| 1 | Lingkungan fisik Kantor DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beralamat Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang |
| 2 | Program DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Program kegiatan tertera dipapan pengumuman. Peneliti mendapatkan data tentang program DLH saat ini sedang berjalan. |
| 3 | Fasilitas kantor DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Fasilitas penunjang aktivitas DLH dinilai cukup baik. Terdapat beberapa fasilitas seperti: ruang informasi, ruang tamu, ruang kerja dan lain-lain. |
| 4 | Contoh tanaman untuk reklamasi pasca penambangan | | √ | - |
| 5 | Contoh tanaman mangrove layak tanam | √ | | pembibitan mangrove yang dirawat sampai layak tanam. |
| 6 | Contoh wadah pembuangan sampah | √ | | Terdapat contoh 5 jenis tong sampah |

Hasil Observasi 3



Hari/Tanggal : 15/4/2018
 Lokasi : Kantor
 WALHI

| No | Aspek yang diamati | Ketersediaan | | Keterangan |
|----|--|--------------|-------|---|
| | | Ada | Tidak | |
| 1 | Lingkungan fisik Kantor WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | √ | | Kantor GAPABEL berada di Kandank GAPABEL beralamat di Jl. Hayati Mahim, Kelurahan Pangkal lalang, Tj. Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 33411. Data yang diperoleh peneliti pertama menyerahkan surat penelitian kepada Pifin Heriyanto sebagai Ketua Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL). |
| 2 | Fasilitas Koleksi Buku Rumah Baca Akar GAPABEL | √ | | Koleksi Buku Rumah Baca Akar GAPABEL cukup memadai dengan berbagai macam buku bacaan. |

Hasil Poto-Poto Observasi Penelitian



WALHI Provinsi Kepulauan Bangka



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kandank GAPABEL



Contoh reklamasi bekas Tambang Inkonvensional (TI)



Ruang Rapat WALHI



Tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Desa Payung



Wawancara dengan WALHI



Wawancara dengan Zulvan Setiawan



Ruang Kerja WALHI

Lampiran 2. Surat-Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550836 pesawat 229, Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARSO
Jabatan/Pekerjaan : LEKTOR KEPALA / DOSEN JUR Pkn
Instansi Asal : JUR. Pkn FIS UNG

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:

Gerakan Ekologi Kewarganegaraan (Ecological Citizenship) sebagai Upaya Penguatan Karakter Peduli Lingkungan dari mahasiswa:

Nama : Setiawan Gusmadi
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
NIM : 16730251027

(sudah siap/belum siap)* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk wawancara kurang sesuai dengan Rumusan Masalah.
2. Instrumen untuk observasi & dokumentasi dibuat hrs sesuai dg Rumusan Masalah.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14-2- 2018

Validator,

SUNARSO

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550836 pesawat 229, Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Dr. Mukminan*
Jabatan/Pekerjaan : *Dosen PPs.*
Instansi Asal : *UNY*

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:

Gerakan Ekologi Kewarganegaraan (Ecological Citizenship) sebagai Upaya Penguatan Karakter
Peduli Lingkungan
dari mahasiswa:

Nama : Setiawan Gusmadi
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
NIM : 16730251027

(sudah siap/~~belum siap~~)* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran
sebagai berikut:

1. *Sesuai format*
- 2.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *12 Feb.* 2018

Validator,

Mukminan

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, kerjasama_pasca@yahoo.com

Nomor : 2271 /UN34.17/LT/2018

7 Februari 2018

Hal : Izin Penelitian

Yth. Gubernur DIY
C.q. Kepala Bakesbangpol DIY

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama : SETIAWAN GUSMADI
NIM : 16730251027
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Konsentrasi : PKn

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu : Pebruari s.d April 2018
Lokasi/Objek : Jln.Belanak Raya No. 64 RT.02 RW.02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam
Judul Penelitian : Gerakan Ekologi Kewarganegraan (Ecological Citizenship) Sebagai Upaya Penguatan Karakter Peduli Lingkungan
Pembimbing : Dr. Samsuri, M.Ag.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih



Wakil Direktur I,

Tembusan:
Mahasiswa Ybs.

Dr. Sugito, MA.
NIP 19600410 198503 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326

Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, kerjasama_pasca@yahoo.com

Nomor : 3075TUN34.17/LT/2018

22 Februari 2018

Hal : Izin Penelitian

Yth. Direktur ED WALHI Bangka Belitung

Jl. Belanak Raya No. 64 Air Salemba Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama : SETIAWAN GUSMADI
NIM : 16730251027
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Konsentrasi : PKn

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu : Februari s.d April 2018
Lokasi/Objek : ED WALHI Bangka Belitung
Judul Penelitian : Gerakan *Ecological Citizenship* sebagai Upaya Penguatan Karakter Peduli Lingkungan
Pembimbing : Dr. Samsuri, M.Ag.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

Wakil Direktur I,



Tembusan:
Mahasiswa Ybs.

Dr. Sugito, MA.
NIP 19600410 198503 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, kerjasama_pasca@yahoo.com

Nomor : 3075/UN34.17/LT/2018
Hal : Izin Penelitian

22 Februari 2018

Yth. Ketua Gabungan Pencinta Alam Belitung (GAPABEL)
Jl. Diponegoro No. 10. Jl A. Yani No. 26 Tanjungpandan Belitung

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:

Nama : SETIAWAN GUSMADI
NIM : 16730251027
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Konsentrasi : PKn

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada:

Waktu : Februari s.d April 2018
Lokasi/Objek : Gabungan Pencinta Alam Belitung
Judul Penelitian : Geraka *Ecological Citizenship* Sebagai Upaya Penguatan Karakter Peduli Lingkungan
Pembimbing : Dr. Samsuri, M.Ag.

Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

Wakil Direktur I,



Tembusan:
Mahasiswa Ybs.

Dr. Sugito, MA.
NIP 19600410 198503 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2108/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Bangka Belitung
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bangka Belitung

di Pangkal Pinang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri
Yogyakarta
Nomor : 2271/UN34.17/LT/2018
Tanggal : 7 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"GERAKAN EKOLOGI KEWARGANEGARAAN (ECOLOGICAL CITIZENSHIP) SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN"** kepada:

Nama : SETIAWAN GUSMADI
NIM : 16730251027
No.HP/Identitas : 081995271401/1903050101930001
Prodi/Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - WALHI Bangka Belitung
- Gabungan Pecinta Alam Belitung
Waktu Penelitian : 22 Februari 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel Air Itam – Pangkalpinang Telp. (0717) 439369; 439371

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/14 /KESBANGPOL-III/2018

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri D).
- b. Menimbang : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :074/2108/Kesbangpol/2018 Tanggal 22 Februari 2018

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/Obyek : Setiawan Gusmadi
- b. Jabatan : Mahasiswa
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan proposal berjudul "**Gerakan Ekologi Kewarganegaraan (*Ecological Citizenship*) Sebagai Upaya Penguatan Karakter Peduli Lingkungan**".
- 2) Lokasi Penelitian : Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung
- 3) Waktu/lama penelitian : Februari s.d April 2018
- dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian/survei/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota dan Dinas terkait setempat dengan menunjukkan rekomendasi penelitian ini.
2. Peneliti tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud.
3. Peneliti wajib mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
4. Dalam hal penelitian melebihi dari waktu berakhirnya rekomendasi penelitian, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Peneliti diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Peneliti yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat), serta penelitian yang dilaksanakan menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Februari 2018

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



Drs. H. TARMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681111 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Walikota Pangkalpinang
3. Bupati Belitung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung
5. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
6. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Belitung



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Pangkalpinang
Telp. (0717) 431476

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 017/ KESBANGPOL /II/ 2018

- Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
- Memperhatikan : Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 070/14/KESBANGPOL-III/2018 Tanggal 27 Februari 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Memberi rekomendasi kepada :

- Nama : Setiawan Gusmadi
Jabatan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan penelitian/survey/riset di wilayah Kota Pangkalpinang (WALHI Kota Pangkalpinang), dengan Judul “ Gerakan Ekologi Kewarganegaraan (*Ecological Citizenship*) Sebagai Upaya Penguatan Karakter Peduli Lingkungan” . (waktu pelaksanaan bulan Februari s.d April 2018) “

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/survey/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat dengan menunjukkan rekomendasi penelitian ini.
2. Penelitian/survey/riset yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul penelitian/survey/riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan serta mentaati norma adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian ini telah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
5. Setelah selesai melakukan penelitian agar membuat laporan secara tertulis kepada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.
6. Rekomendasi penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 28 Februari 2018

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG,


Hi. SUHARTINI.MS.SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600216 198101 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pangkalpinang
2. Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Air Itam - Pangkalpinang (0717) 436975,
email : dlh@babelprov.go.id,website : dlh.babelprov.go.id

Pangkalpinang, (Maret 2018

Nomor : 070 /319 /DLH
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
di -

Yogyakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor : 3075/UN34.17/LT/2018 tanggal 22
Februari 2018 perihal Izin Penelitian atas nama :

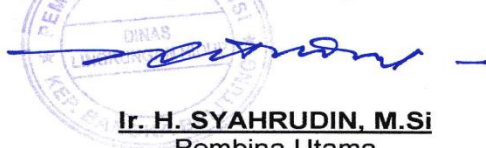
Nama : Setiawan Gusmadi
NIM : 16730251027
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Konsentrasi : PKn

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menerima izin penelitian di Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Februari
s.d. April 2018

Untuk pelaksanaan teknis, persyaratan dan tata tertib penelitian dapat
menghubungi Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,**



Ir. H. SYAHRUDIN, M.Si
Pembina Utama
NIP.196202131990031003

*di Ke P'Wifry & P'P'ng
L. 5/3/2018.*